



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 18.1 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 1 huruf O, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Ternate.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
10. Analisis Standar Belanja Non Fisik adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.
11. Analisis Standar Belanja Fisik adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan pekerjaan fisik dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.
12. Standar Harga Satuan adalah harga tertinggi satuan barang yang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan pada anggaran tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali kota ini sebagai pedoman PD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan wali kota ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman bagi PD dalam penyusunan RKA SKPD/DPA SKPD serta dokumen rencana kerja dan anggaran lainnya, guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.

BAB III ANALISIS STANDAR BIAYA

Pasal 4

- (1) Setiap penyusunan program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh PD harus berpedoman pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. struktur ASB; dan
 - b. jenis ASB berdasarkan hasil klasifikasi kegiatan.
- (3) Penjabaran tentang ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Dalam hal ini terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Ternate maka dilakukan penyesuaian ASB.

Pasal 6

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi setempat dan memperhatikan prinsip penilaian kewajaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala PD.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Juli 2024

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 580.1

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 18.1 TAHUN 2024
 TENTANG :
 ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2025

1. ASB 001-JASA SURAT-MENYURAT

Deskripsi:

Surat-menyurat merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lain. Informasi dalam surat dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan sebagainya. Surat menyurat ini dapat terjadi dalam SKPD, dengan pihak diluar SKPD secara lokal maupun nasional.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah surat, durasi dalam bulan, tingkatan daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 1.500,00 per kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 950,00 per jumlah surat per bulan disesuaikan dengan tingkatan daerah

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 1.500,00 + (Rp 950,00 x Jumlah Surat x Jumlah Bulan x Bobot Tingkatan Daerah)

Tabel 1
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 001

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,69%	1,95%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	79,05%
3	Belanja Jasa Kantor	0,00%	46,23%	15,82%
4	Belanja Bahan/Materai	0,00%	17,38%	3,18%
	Jumlah			100%

Keterangan :

Bobot tingkatan daerah:

Bobot 1 : untuk tingkatan di lingkungan SKPD Kota Ternate

Bobot 2 : untuk tingkatan di luar Kota Ternate

2. ASB 002-PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

Deskripsi:

Bahan Logistik Kantor merupakan bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan operasional SKPD. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup ATK dalam rangkaian kegiatannya.

Satuan pengendali biaya (*cost driver*):

Jumlah Bahan Logistik Kantor (Paket), dan Durasi Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 60.000,00 per Jumlah ATK (Paket) per Durasi Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 60.000,00 x Jumlah ATK (paket) x Durasi Bulan)

Tabel 2
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 002

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Makan dan Minum	0,00%	100,00%	93,69%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	1,47%	0,24%
3	Uang Lembur	0,00%	30,11%	6,07%
	Jumlah			100%

3. ASB 003-PENGADAAN BARANG CETAKAN

Deskripsi:

Pengadaan Barang Cetak merupakan kegiatan untuk memperoleh barang cetak yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan barang cetak dalam rangkaian kegiatannya. Pengadaan barang cetak merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan barang

cetakan karena adanya kebutuhan tertentu dalam untuk mendukung aktivitas SKPD secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Barang Cetak, dan Jenis Cetak

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp 70.452.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Barang Cetak disesuaikan dengan Jenis Cetak

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 70.452.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Barang Cetak x Bobot Jenis Cetak)

Tabel 3
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 003

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,69%	0,10%
2	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00%	100,00%	92,49%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	29,28%	6,12%
4	Belanja Jasa Kantor	0,00%	9,23%	1,29%
	Jumlah			100%

Keterangan:

Bobot 1 : jenis cetakan brosur, pamflet, sticker

Bobot 2 : jenis cetakan buku

4. ASB 004-PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

Deskripsi:

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga atau instansi di luar daerah yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah lembaga yang dicakup dalam koordinasi serta durasi proses koordinasi dilakukan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 3.367.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 142.000,00 per Jumlah Lembaga yang dicakup dalam koordinasi per Durasi Proses Koordinasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 3.367.000,00 + (Rp 142.000, x Jumlah lembaga x Durasi Proses Kordinasi)

Tabel 4
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 004

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	0,04%	0,01%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	1,84%	0,25%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	99,65%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,30%	0,04%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,04%	0,01%
6	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	0,40%	0,05%
	Jumlah			100%

5. ASB 005-PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR**Deskripsi:**

Pendidikan dan pelatihan untuk aparatur merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan

Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 61.523.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 349.600,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 61.523.000 + (Rp 349.600,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 5
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 005

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	0,69%	0,13%
4	Belanja Makan dan Minum	0,00%	6,55%	1,20%
5	Belanja Perjalanan Dinas	39,76%	100,00%	90,49%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,53%	0,10%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,43%	0,08%
8	Belanja Kursus Pelatihan dan Lain-Lain	0,00%	24,50%	8,01%
Jumlah				100%

Keterangan:

- a. Hari pelatihan x jumlah peserta harus berada diantara rentang optimalitas.
- b. Untuk Diklat yang membutuhkan durasi waktu khusus bisa diberlakukan aturan khusus seperti diklat calon pegawai yang membutuhkan durasi kira-kira 35 hari pelatihan.

6. ASB 006-PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON APARATUR

Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan non aparatur merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para non apartur di luar satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan
Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 157.200.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 157.200.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 6
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 006

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Makan dan Minum	0,00%	100,00%	3,14%
2	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	35,69%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	100,00%	1,05%
4	Belanja Kursus Pelatihan dan Lain-Lain	0,00%	100,00%	60,11%
Jumlah				100%

Keterangan:

- a. Hari pelatihan x jumlah peserta harus berada diantara rentang optimalitas.
- b. Untuk Diklat yang membutuhkan durasi waktu khusus bisa diberlakukan aturan khusus.

7. ASB 007- BIMBINGAN TEKNIS APARATUR

Deskripsi:

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Jumlah Hari Pelatihan Dan Tingkatan Daerah.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 56.766.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 1.029.000,00 per Peserta per Jumlah Hari Pelatihan disesuaikan dengan Bobot Tingkatan Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 56.766.000,00 + (Rp 1.029.000,00 x Jumlah Peserta Bimbingan x Jumlah Hari Pelatihan x Bobot Tingkatan Daerah)

Tabel 7
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 007

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor Non PNS	0,00%	4,08%	0,70%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	17,18%	4,60%
3	Belanja Perjalanan Dinas	19,93%	100,00%	78,40%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	8,14%	2,65%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	1,93%	0,33%
6	Belanja Jasa Kantor	0,00%	11,24%	3,13%
7	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	24,90%	4,71%
8	Belanja Kursus Pelatihan dan lain-lain	0,00%	23,23%	5,47%
Jumlah				100%

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas ingin menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

8. ASB 008-SOSIALISASI/PENYULUHAN PROGRAM ATAU PRODUK

Deskripsi:

Sosialisasi/Penyuluhan program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada staf atau masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Frekuensi Sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 14.973.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 1.402.800,00 per Jumlah Peserta per Frekuensi Sosialisasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 14.973.000,00 + (Rp 1.402.800,00 x Jumlah Peserta x Frekuensi Sosialisasi)

Tabel 8
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 008

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	28,32%	7,10%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	73,61%	24,90%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	149,72%	49,19%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,09%	0,68%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	16,07%	5,61%
6	Belanja Jasa Kantor	0,00%	23,41%	8,14%
7	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	14,91%	4,37%
Jumlah				100%

Keterangan :

Bobot Jenis Peserta Sosialisasi:

Bobot 1 : peserta sosialisasi adalah pegawai instansinya sendiri

Bobot 2 : peserta sosialisasi adalah masyarakat luar

9. ASB 009-PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DI DAERAH

Deskripsi:

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan daerah. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya rancangan peraturan daerah final.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Raperda yang Dibuat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 485.774.000,00 per Jumlah Raperda

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 485.774.000,00 x Jumlah Raperda)

Tabel 9
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 009

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	80,91%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	46,09%	19,09%
Jumlah				100%

10. **ASB 010-PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN NON KEUANGAN**

Deskripsi:

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ataupun laporan kinerja.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Obyek yang Dilaporkan dan Tingkatan Obyek

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 11.309.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Obyek disesuaikan dengan Bobot Tingkatan Obyek

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 11.309.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Obyek x Bobot Tingkatan Obyek)

Tabel 10

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 010

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Makan dan Minum	0,00%	24,88%	7,21%
2	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	52,18%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,67%	0,19%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	44,74%	23,10%
5	Uang Lembur	0,00%	50,84%	17,31%
	Jumlah			100%

Keterangan:

Bobot Tingkatan Obyek/Indikator yang dilaporkan:

- Bobot 1 : jika laporannya berupa laporan final atas obyek setingkat lembaga Pemerintahan;
- Bobot 2 : jika laporannya berupa laporan final atas obyek yang setingkat Instansi;
- Bobot 3 : jika laporannya berupa Laporan final setingkat pemerintah Kabupaten

11. ASB 011-PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Deskripsi:

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan penggunaan keuangan daerah dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Obyek yang Dilaporkan dan Tingkatan Obyek

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 10.548.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 per Jumlah Obyek disesuaikan dengan Bobot Tingkatan Obyek

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 10.548.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Obyek x Bobot Tingkatan Obyek)

Tabel 11
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 011

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Makan dan Minum	0,00%	76,59%	24,72%
2	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	41,17%	12,92%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	12,18%	2,93%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	57,46%
5	Uang Lembur	0,00%	6,89%	1,98%
	Jumlah			100%

Keterangan:

Bobot Tingkatan Obyek/Indikator yang dilaporkan:

Bobot 1: jika laporannya berupa laporan final atas obyek setingkat lembaga Pemerintahan;

Bobot 2: jika laporannya berupa laporan final atas obyek yang setingkat Instansi;

Bobot 3: jika laporannya berupa Laporan final setingkat pemerintah Kabupaten

12. ASB 012-PENYUSUNAN PROFIL WILAYAH/DAERAH/TEMPAT/LOKASI/OBJEK

Deskripsi:

Penyusunan profil Wilayah / Daerah/ Tempat / Lokasi, masuk dalam kategori kegiatan ini. Kegiatan ini tidak mencakup penyusunan profil orang/lembaga. Kegiatan ini dimulai dari dipersiapkannya kegiatan

sampai dengan diserahkannya buku profil wilayah / daerah / lokasi dan laporan pertanggungjawaban kepada yang berwenang.

Pengendalian Belanja (cost driver)

Jenis Profil dan Jenis Pengerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 550.000.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jenis Profil disesuaikan dengan Bobot Jenis Pengerjaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 550.000.000,00 + (Rp 0,00 x Jenis Profil x Bobot Jenis Pengerjaan)

Tabel 12
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 012

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Makan dan Minum	0,00%	100,00%	1,47%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	100,00%	2,59%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	2,72%
4	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	100,00%	93,22%
Jumlah				100%

Bobot Tingkatan Objek Penulisan :

Bobot 1 : apabila penulisan profil deskripsi dari suatu daerah/wilayah

Bobot 2 : apabila penulisan profil berupa non struktur fisik

Keterangan :

Bobot 1 : apabila penulisan profil dikerjakan oleh pihak ketiga

Bobot 10 : apabila penulisan profil dikerjakan sendiri

13. ASB 013-PENYUSUNAN STANDAR

Deskripsi:

Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlaku selama ini. Standar yang dihasilkan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan standar tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Standar yang Dibuat

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Standar yang dibuat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 1.400.132.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Standar yang dibuat

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 1.400.132.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Standar yang dibuat)

Tabel 13
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 013

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	100,00%	1,88%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	100,00%	7,78%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	20,52%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	100,00%	1,25%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	9,11%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00%	100,00%	0,18%
7	Belanja Kursus Pelatihan dan Lain-Lain	0,00%	100,00%	5,71%
8	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	100,00%	53,57%
	Jumlah			100%

Keterangan:

Penyusunan standar diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan namun dengan persetujuan dari pihak yang berwenang ataupun panitia anggaran. Penambahan belanja yang disebabkan karena Penggunaan Pihak ketiga sebagai konsultan penyusunan standar tidak termasuk dalam jumlah di atas dan dikeluarkan dari ketentuan distribusi pengalokasian belanja pada obyek belanja, serta dikenai ketetapan maksimum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau panitia anggaran.

Dengan demikian nilai yang harus dialokasikan dalam obyek belanja hanyalah nilai berdasarkan perhitungan formula di atas.

14. ASB 014-KOORDINASI

Deskripsi:

Koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah lembaga yang dicakup dalam koordinasi serta durasi proses koordinasi dilakukan. Satu kali koordinasi setara dengan satu minggu, satu bulan koordinasi setara dengan 4 kali atau 4 minggu proses koordinasi. (1 instansi = 5 orang perwakilan instansi)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 18.794.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 804.000,00 per Jumlah Lembaga per Durasi Proses Koordinasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 18.794.000,00 + (Rp 804.000,00 x Jumlah Lembaga x Durasi Proses Koordinasi)

Tabel 14
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 014

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	100,00%	30,31%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	30,90%	12,63%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	60,82%	17,79%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	12,25%	5,37%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	68,67%	23,52%
6	Belanja Jasa Kantor	0,00%	27,87%	8,09%
7	Uang Lembur	0,00%	16,25%	2,29%
	Jumlah			100%

Keterangan:

ASB ini dapat digunakan untuk menganalisis 3 jenis aktivitas penyelenggaraan forum komunikasi atau koordinasi yaitu:

- antar instansi
- antar lembaga atau
- dengan masyarakat umum.

15. ASB 015-PAMERAN

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Standar analisis belanja pameran digunakan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran yang dimaksud di atas. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Karya, Durasi Hari Pameran, Jenis Karya, dan Kategori Daerah

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 62.947.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 Jumlah Karya per Durasi Hari Pameran disesuaikan dengan Jenis Karya dan Kategori Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 62.947.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Karya x Durasi Hari Pameran x Jenis Karya x Kategori Daerah)

Tabel 15
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 015

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Makan dan Minum	0,00%	37,26%	15,43%
2	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	55,30%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,86%	0,36%
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	69,79%	28,91%
	Jumlah			100%

Keterangan:

a. Bobot Jenis Karya:

- Bobot 1 : untuk pameran karya seni rupa dan seni kriya
- Bobot 2 : untuk pameran non karya seni rupa dan seni kriya

Bobot Kategori Daerah:

- Bobot 1 : untuk pameran yang diselenggarakan di dalam kota
- Bobot 2 : untuk pameran yang diselenggarakan di luar daerah

16. ASB 016-PENELITIAN/SURVEY DAN ANALISIS

Deskripsi:

Penelitian/Survey/Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu permasalahan ke dalam komponen-komponen penyusunnya agar dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam topik permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dihadirkan dalam struktur atau format yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya. Ketidakmampuan untuk memenuhi semua kriteria di atas sebaiknya mengikuti ketentuan dalam pengamatan singkat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Topik Analisis/Survey dan Durasi Analisis/Survey

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 267.075.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 36.124.000,00 per Jumlah Topik Analisis / Survey per Durasi Analisis/ Survei

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 267.075.000,00 + (Rp 36.124.000,00 x Jumlah Topik Analisis/Survey x Durasi Analisis/Survey)

Tabel 16
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 016

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	23,31%
2	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	100,00%	76,69%
	Jumlah			100%

17. ASB 017-KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Deskripsi:

Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina kerjasama suatu lembaga dengan lembaga lain. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka harus dihasilkan kesepakatan sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban kegiatan. Jika beberapa satuan kerja perangkat daerah terlibat dalam kegiatan kerjasama ini maka belanja untuk kegiatan ini hanya diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan ini dan bukan pada satuan kerja perangkat daerah-satuan kerja perangkat daerah lain yang bertindak sebagai peserta kerjasama.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kesepakatan, Jumlah Lembaga Peserta Kerjasama, dan Tingkatan Lembaga.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 65.300.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 54.000,00 per Jumlah Kesepakatan per Jumlah Lembaga Peserta Kerjasama, disesuaikan dengan Bobot Tingkatan Lembaga

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 65.300.000,00 + (Rp 54.000,00 x Jumlah Kesepakatan x Jumlah Lembaga Peserta Kerjasama x Bobot Tingkatan Lembaga)

Tabel 17
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 017

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor Non PNS	0,00%	92,65%	30,88%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	16,75%	5,86%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	99,96%	52,13%
4	Uang Lembur	0,00%	33,38%	11,13%
	Jumlah			100%

Keterangan:

Bobot Tingkatan Lembaga:

- a. Bobot 3 : untuk kerjasama antar lembaga setingkat Provinsi
- b. Bobot 2 : untuk kerjasama antar lembaga setingkat kota/kabupaten
- c. Bobot 1 : untuk kerjasama antar lembaga tingkat di bawah kota/kabupaten

18. ASB 018-PENINGKATAN WAWASAN/KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Deskripsi:

Standar Analisis Belanja ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu. Penataran, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan dan sebagainya yang tidak menuntut keahlian atau kompetensi teknis yang kesemuanya hanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan dapat digolongkan dalam kegiatan jenis ini

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jenis Tes

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 121.219.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 6.028.600,00 per Jumlah peserta disesuaikan dengan Jenis tes

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 121.219.000,00 + (Rp 6.028.600,00 x Jumlah peserta x Jenis tes)

Tabel 18
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 018

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor Non PNS	11,76%	39,82%	25,79%
2	Belanja Makan dan Minum	5,10%	10,44%	7,77%
3	Belanja Perjalanan Dinas	36,12%	83,29%	59,70%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,32%	9,15%	6,73%
Jumlah				100%

19. ASB 019-PEMBAHASAN**Deskripsi:**

Pembahasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka membahas sebuah dokumen.

Pengendali (cost driver) :

Jumlah Dokumen yang dibahas

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 455.856.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 134.428.000,00 per Jumlah Dokumen yang dibahas

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 455.856.000,00 + (Rp 134.428.000,00 x Jumlah Dokumen yang dibahas)

Tabel 19
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 019

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Perjalanan Dinas	67,14%	100,00%	98,19%
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00%	5,86%	1,81%
Jumlah				100%

20. ASB 020-PENYUSUNAN PEDOMAN/DOKUMEN

Deskripsi:

Penyusunan pedoman atau panduan adalah kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk konsepsi strategis, teknis, atau praktis atas kebijakan, peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan.

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Panduan/Dokumen dan Jenis Panduan/Dokumen

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 26.297.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 441.700,00 per Jumlah Panduan/Dokumen dan Jenis Panduan/Dokumen

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 26.297.000,00 + (Rp 441.700,00 x Jumlah Panduan/Dokumen dan Jenis Panduan/Dokumen)

Tabel 20
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 020

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	37,65%	5,20%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	27,80%	10,95%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	85,05%	25,25%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	8,85%	3,56%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	38,10%	16,29%
6	Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,45%	0,06%
7	Uang Lembur	0,00%	20,57%	6,90%
8	Belanja Pemeliharaan Aset tidak Berwujud	0,00%	32,91%	4,54%
9	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	100,00%	27,26%
	Jumlah			100%

21. ASB 021-PENYELENGGARAAN MUSREMBANG

Deskripsi:

Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Musrenbag dilakukan pada berbagai tingkatan daerah

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah Peserta dan Hari Pelaksanaan Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 449.942.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 per Jumlah Peserta per hari pelaksanaan kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 449.942.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Peserta x hari pelaksanaan kegiatan)

Tabel 21
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 021

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor Non PNS	0,00%	100,00%	22,32%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	100,00%	3,96%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	39,66%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	100,00%	7,10%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	26,95%
	Jumlah			100%

22. ASB 022-PEMBINAAN

Deskripsi:

Pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimilikinya, yang bertujuan untuk membantu dan mengembangkan kecakapan dan pengetahuan yang sudah ada serta mendapatkan kecakapan pengetahuan untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara efektif dan efisien.

Pengendalian Belanja (*cost driver*) :

Jumlah Kegiatan/Lembaga, Jumlah Peserta dan Durasi Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 87.712.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 50.000,00 per Jumlah Lembaga disesuaikan dengan Durasi dalam Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 87.712.000,00 + (Rp 50.000,00 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam Bulan)

Tabel 22
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 022

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor Non PNS	0,00%	37,02%	15,65%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	38,11%	18,53%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	85,47%	31,77%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,11%	1,16%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	38,01%	18,23%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	12,46%	3,64%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00%	3,18%	0,93%
8	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	12,75%	4,48%
9	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	20,07%	5,61%
Jumlah				100%

23. ASB 023-MONITORING DAN EVALUASI**Deskripsi:**

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik. Jika kegiatan ini melibatkan uji sampel maka nilai bobot uji sampel bertindak sebagai penyesuai beban kerja kegiatan. Dengan demikian belanja ini telah mencakup belanja untuk uji sampel bagi kegiatan yang menggunakan uji sampel.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Obyek, Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 57.595.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 5.581.800,00 per Jumlah obyek, Jumlah pengamatan dan tingkatan pengamatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 57.595.000,00 + (Rp 5.581.800,00 x Jumlah obyek x Jumlah pengamatan, x Tingkatan pengamatan)

Tabel 23
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 023

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor Non PNS	0,00%	8,41%	2,05%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	14,88%	4,70%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	50,00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,80%	0,77%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	18,16%	5,08%
6	Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,96%	0,17%
7	Uang Lembur	0,00%	0,63%	0,15%
8	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	100,00%	37,07%
	Jumlah			100%

24. ASB 024-PENDAMPINGAN**Deskripsi:**

Proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi suatu objek/kegiatan yang bertujuan untuk mendampingi suatu objek/kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kegiatan, Durasi dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 148.717.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 149.000,00 per Jumlah Lembaga disesuaikan Durasi dalam Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 148.717.000,00 + (Rp 149.000,00 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam Bulan)

Tabel 24
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 024

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor Non PNS	0,00%	7,64%	3,29%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	10,07%	4,42%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	57,88%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	2,83%	1,10%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	66,99%	21,24%
6	Belanja Jasa Kantor	0,00%	2,86%	0,99%
7	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	2,26%	0,67%
8	Belanja Kursus Pelatihan dan Lain-Lain	0,00%	31,20%	10,41%
Jumlah				100%

25. ASB 025-AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi:

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Parameter yang Diakreditasi.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 283.595.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 per Jumlah Parameter yang Diakreditasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 283.595.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Parameter yang Diakreditasi)

Tabel 25
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 025

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	100,00%	8,57%
2	Honor Non PNS	0,00%	100,00%	5,71%
3	Belanja Makan dan Minum	0,00%	100,00%	22,35%
4	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	32,11%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	3,61%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00%	100,00%	25,74%
7	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	100,00%	1,90%
Jumlah				100%

Keterangan:

Jika suatu akreditasi berlangsung dalam 1 rangkaian waktu dengan parameter akreditasi yang sama maka jumlah parameter dianggap bernilai 1.

26. ASB 026-PEMBINAAN/PEMBERDAYAANLEMBAGA/MASYARAKAT DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Deskripsi:

Pembinaan/pemberdayaan lembaga/masyarakat di luar instansi pemerintah merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintah dengan memberikan bimbingan, pemberdayaan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina. Kegiatan ini hanya mengakui atau menghitung berdasarkan tatap muka yang dilakukan. Hubungan telepon atau surat menyurat belum layak dikategorikan dalam jenis kegiatan ini.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lembaga yang Dibina, Frekuensi Pembinaan dan Jenis Lokasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 817.872.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 per Jumlah Lembaga yang dibina, disesuaikan dengan frekuensi pembinaan dan Jenis Lokasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 817.872.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Lembaga yang Dibina x Frekuensi Pembinaan x Jenis Lokasi)

Tabel 26
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 026

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor Non PNS	0,00%	4,81%	1,17%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	2,07%	0,63%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	8,34%	2,99%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,25%	0,06%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	35,32%	7,85%
6	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	1,82%	0,52%
7	Belanja Modal Alat-Alat Studio	0,00%	0,12%	0,02%
8	Belanja Jasa Konsultasi	0,00%	3,77%	0,75%
9	Modal Pengadaan Perlatan Kantor	0,00%	12,53%	2,51%
10	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	100,00%	77,60%
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00%	29,54%	5,91%
Jumlah				100%

Keterangan :

Bobot Jenis Lokasi:

- a. Bobot 1 : untuk pembinaan lembaga yang berlokasi di dalam kota
 - b. Bobot 3 : untuk pembinaan lembaga yang berlokasi di luar kota
- Frekuensi pembinaan dihitung dengan jumlah hari pertemuan pembinaan.

27. ASB 027-PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Deskripsi :

Peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam menjalankan tupoksi

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lembaga dan Durasi Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 170.207.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 1.606.000,00 per Jumlah Lembaga disesuaikan dengan Durasi Dalam Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 170.207.000,00 + (Rp 1.606.000,00 x Jumlah Lembaga x Durasi Dalam Bulan)

Tabel 27
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 027

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	8,98%	2,72%
2	Honor Non PNS	0,00%	25,00%	9,99%
3	Belanja Makan dan Minum	0,00%	49,75%	17,88%
4	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	41,22%	19,11%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	6,94%	1,80%
6	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	8,87%	3,52%
7	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	22,31%	9,73%
8	Belanja Kursus Pelatihan dan Lain-Lain	0,00%	4,16%	1,26%
9	Belanja Pakaian Kerja	0,00%	28,11%	8,89%
10	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	100,00%	25,12%
Jumlah				100%

28. ASB 028-PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Deskripsi:

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah penyedia jasa untuk memberikan pelayanan kelancaran aktivitas perkantoran.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pemakaian sumberdaya komunikasi, air dan listrik dan durasi dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 500.100.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 per Jumlah pemakaian sumberdaya komunikasi, air dan listrik disesuaikan dengan durasi dalam bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 500.100.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah pemakaian sumberdaya komunikasi, air dan listrik x durasi dalam bulan)

Tabel 28
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 028

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,33%	0,05%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,36%	0,05%
3	Belanja Jasa Kantor	0,00%	100,00%	99,51%
4	Belanja Pemi Software/ Website	0,00%	1,09%	0,17%
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00%	1,52%	0,23%
	Jumlah			100%

29. ASB 029-RAPAT KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DALAM DAERAH

Deskripsi:

Rapat Koordinasi dan penyusunan dalam daerah merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan dengan lembaga atau instansi di dalam daerah yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah lembaga yang dicakup dalam koordinasi dan durasi proses koordinasi dilakukan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 18.950.000,00 per Jumlah Lembaga yang dicakup dalam koordinasi per Durasi Proses Koordinasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 18.950.000,00 x Jumlah lembaga x Durasi Proses Kordinasi)

Tabel 29
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 029

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	5,78%	0,87%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	48,76%	16,79%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	78,80%	14,44%
4	Belanja Cetak dan	0,00%	30,97%	12,02%

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
	Penggandaan			
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	97,80%	37,55%
6	Uang Lembur	0,00%	59,20%	18,33%
	Jumlah			100%

30. ASB035-JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

Deskripsi:

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah para penyedia jasa untuk memberikan pelayanan jasa dukungan administrasi/ teknis perkantoran dengan tujuan untuk kelancaran administrasi perkantoran.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang, dan Durasi Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 174.722.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 837.000,00 per Jumlah Orang disesuaikan Durasi dalam bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 174.722.000,00 + (Rp 837.000,00 x Jumlah Orang x Durasi dalam bulan)

Tabel 30
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 030

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	1,24%	13,83%	7,54%
2	Honor Non PNS	0,00%	100,00%	90,91%
3	Belanja Makan dan Minum	0,00%	6,36%	0,86%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	2,58%	0,69%
	Jumlah			100%

31. ASB 031-PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Deskripsi:

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional merupakan jasa yang diberikan untuk memelihara dan mengurus perizinan kendaraan dinas/operasional pada masing-masing SKPD

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kendaraan dan Durasi Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 51.492.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 1.408.400,00 per Jumlah Kendaraan disesuaikan Durasi dalam bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 51.492.000,00 + (Rp 1.408.400,00 x Jumlah Kendaraan x Durasi dalam bulan)

Tabel 31
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 031

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	22,36%	2,64%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	64,17%
3	Belanja Jasa Kantor	0,00%	36,80%	10,06%
4	Uang Lembur	0,00%	6,55%	0,77%
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00%	57,39%	22,37%
Jumlah				100%

32. ASB 032-REVIU**Deskripsi:**

Reviu adalah kegiatan untuk memeriksa sebuah laporan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam laporan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Laporan Reviu, Durasi Waktu Reviu dan Jumlah Tim Reviu

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 31.937.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Laporan Reviu, Durasi Waktu Reviu dan Jumlah Tim Reviu

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 31.937.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Laporan Reviu x Durasi Waktu Reviu x Jumlah Tim Reviu)

Tabel 32
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 032

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Perjalanan Dinas	77,67%	100,00%	100,00%
	Jumlah			100%

33. ASB 033-PUBLIKASI

Deskripsi:

Kegiatan publikasi ini adalah publikasi program atau informasi yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat melalui dokeumentasi media cetak maupun media elektronik.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah paket, durasi tayang dan kelas media

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 119.999.900,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah paket, durasi tayang dan kelas media

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 119.999.900,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Paket x Durasi Tayang x Kelas Media)

Tabel 33
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 033

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	100,00%	19,88%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	100,00%	32,62%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	31,50%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	100,00%	0,93%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	8,38%
6	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	100,00%	6,71%
	Jumlah			100%

34. ASB 034-PROMOSI

Deskripsi:

Promosi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang

bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka tentang program atau produk tersebut secara langsung.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Objek Promosi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 304.214.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Objek Promosi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 304.214.000,000 + (Rp 0,00 x Jumlah Objek Promosi)

Tabel 34
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 034

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	6,18%	2,31%
2	Honor Non PNS	0,00%	81,64%	28,23%
3	Belanja Makan dan Minum	0,00%	18,34%	7,58%
4	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	93,97%	37,19%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	40,88%	16,60%
6	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	1,93%	0,76%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	2,10%	0,55%
8	Belanja Jasa Kantor	0,00%	9,39%	2,45%
9	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	10,34%	4,00%
10	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	1,26%	0,33%
	Jumlah			100%

35. ASB 035-PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Deskripsi:

Perencanaan dan Pengawasan merupakan kegiatan untuk merencanakan dan mengawasi suatu pekerjaan atau kegiatan di lingkungan SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Perencana/Pengawas dan Durasi Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 47.272.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Perencana/Pengawas per Durasi Dalam Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 47.272.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Perencana/Pengawas x Durasi Dalam Bulan)

Tabel 35
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 035

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	64,73%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	100,00%	35,27%
	Jumlah			100%

36. ASB 036-FASILITASI**Deskripsi:**

Fasilitasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi dalam upaya memberdayakan masyarakat/kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Lembaga dan Jumlah Alat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 143.941.000,00 per Jumlah Lembaga per Jumlah Alat

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 143.941.000,00 x Jumlah Lembaga x Jumlah Alat)

Tabel 36
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 036

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	100,00%	35,30%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	17,35%	4,87%

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	53,56%	14,66%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	8,54%	2,00%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	16,77%	3,39%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,96%	0,16%
7	Belanja Jasa Kantor	0,00%	17,57%	3,55%
8	Uang Lembur	0,00%	1,40%	0,19%
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00%	2,54%	0,52%
10	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	3,14%	0,54%
11	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00%	6,68%	1,48%
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00%	15,42%	3,04%
13	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00%	100,00%	30,18%
14	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	0,91%	0,13%
	Jumlah			100%

37. **ASB 037-PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN**

Deskripsi:

Penanggulangan masalah kesehatan adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan SKPD tersebut dan menangani masalah ringan yang biasa diatasi atau ditangani oleh SDM yang dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM.

Pengendali (*cost driver*) :

Jumlah rumah atau keluarga, anggota masyarakat, lingkungan yang ditangani dan tingkatan kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 579.260.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 per Jumlah Rumah disesuaikan dengan lingkungan yang ditangani per tingkatan kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 579.260.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Rumah x lingkungan yang ditangani x tingkatan kegiatan.)

Tabel 37
Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 037

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	11,16%	4,39%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	100,00%	41,75%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	100,00%	47,06%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,42%	0,91%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	3,14%	0,72%
6	Belanja Jasa Kantor	0,00%	3,24%	0,63%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00%	3,51%	0,78%
8	Belanja Sewa Rumah dan Lain-lain	0,00%	3,39%	1,14%
9	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00%	0,28%	0,05%
10	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	13,07%	2,55%
	Jumlah			100%

Keterangan :

Bobot 1 : untuk penanganan masalah kesehatan yang sifatnya masal

Bobot 2 : untuk penanganan kesehatan untuk keluarga

Bobot 3 : untuk penanganan kesehatan untuk bayi/ibu hamil

38. ASB 038-PENGELOLAAN ATAU MANAJEMEN ASN**Deskripsi:**

Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian dan penghargaan.

Pengendali (cost driver) :

Jumlah Pegawai dan Jumlah Lembaga

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 964.982.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 0,00 per Jumlah Pegawai dan Jumlah Instansi ditangani per tingkatan kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 964.982.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Pegawai x Jumlah Lembaga)

Tabel 38

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 038

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Batas Atas	Rata-Rata
1	Honor PNS	0,00%	32,45%	12,35%
2	Belanja Makan dan Minum	0,00%	8,86%	3,74%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	84,28%	35,99%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,59%	0,27%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	1,47%	0,65%
6	Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,84%	0,24%
7	Belanja Kursus Pelatihan dan Lain-Lain	0,00%	100,00%	43,12%
8	Belanja Aset Tidk Berwujud	0,00%	7,52%	2,18%
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00%	5,01%	1,45%
	Jumlah			100%

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 18.1 TAHUN 2024
 TENTANG :
 ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

FORMAT USULAN TAMBAHAN PAGU KEGIATAN (NILAI OPSIONAL ASB)

1. ASB (Ketik Nomor ASB)
2. Ketik Jenis ASB)
3. Output Kegiatan Berupa
4. Jumlah Alokasi Objek Belanja sesuai ASB..... = Rp.
5. Jumlah Alokasi Objek Belanja tambahan = Rp.
6. Total Pagu Kegiatan setelah penambahan = Rp.
7. Alasan(sebutkan)
8. Dasar Pengusulan(sebutkan)
9. Dengan Perhitungan per rincian objek belanja sebagai berikut:
 Alokasi rincian Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Jumlah	%
1		
2		
3		
4		
dst..			
	Jumlah alokasi sesuai ASB		100%
	Jumlah Alokasi Tambahan		
1		
2		
dst..			
	Total Pagu Kegiatan setelah penambahan		

Ternate,
 Kepala

(.....)

Ket. Nilai yang dicantumkan berupa Angka dan persentasi

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN